

FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOPI

FACTORS RELATED TO COMMUNITY EMPOWERMENT IN COFFEE AREA DEVELOPMENT PLANNING

Fery Murtiningrum^{1*}, Melinda Noer², Sri Wahyuni³and Dodi Devianto⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

⁴Program Studi Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Andalas
 ,Jl. Limau Manis, Padang, 25163, Indonesia

ferymurtiningrum@yahoo.co.id., melindanoer@agr.unand.ac.id.

ABSTRAK

Perencanaan Pengembangan Kawasan kopi penting menjadi perhatian karena menjadi dasar sebuah proses pengembangan kawasan dilakukan untuk pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kawasan termasuk juga pengembangan kawasan kopi dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana tertuang pada rencana pengembangan kawasan kopi (*Action Plan*). Perencanaan Pengembangan kawasan kopi disusun berdasarkan penggalian kebutuhan dan permasalahan serta potensi yang ada berbasiskan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat pada perencanaan pengembangan kawasan kopi pada 2 kawasan yang menjadi lokasi untuk pengembangan kawasan kopi di Provinsi Bengkulu yaitu di wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Pada penelitian ini Metode yang digunakan *mixed methods research*. Alat analisa yang digunakan analisa Kualitatif Deskriptif dan analisa menggunakan SEM PLS. Data di ambil dari petani dan informan. Berdasarkan hasil analisa data penelitian diketahui hasil bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat pada perencanaan pengembangan kawasan kopi adalah akses informasi, Partisipatif dan kelembagaan lokal, di mana pengaruh masing-masing faktor yaitu, untuk akses informasi sebesar 36,81%, untuk partisipatif sebesar 52,42% dan faktor kelembagaan lokal sebesar 37,46 %.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Pembangunan berkelanjutan, Perencanaan, Kopi

ABSTRACT

Coffee area development planning is important to pay attention to because it is the basis for an area development process carried out for sustainable development. Regional development, including the development of coffee areas, is carried out to achieve the goals as stated in the coffee area development plan (Action Plan). Coffee area development planning is prepared based on exploring needs, problems and existing potential based on community empowerment. This research aims to determine the factors related to community empowerment in coffee area development planning in 2 areas that are locations for coffee area development in Bengkulu Province, namely in the Kepahiang Regency and Rejang Lebong Regency. In this research, the method used is mixed methods research. The analytical tools used are descriptive qualitative analysis and analysis using SEM PLS. Data was taken from farmers and informants. Based on the results of research data analysis, it is known that the factors related to community empowerment in coffee area development planning are access to information, participation and local institutions, where the influence of each factor is 36.81% for access to information. for participatory it was 52.42% and the local institutional factor was 37.46%.

Keywords: Empowerment, Sustainable development, Planning, Coffee

Pendahuluan

Kegiatan pembangunan secara umum mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Secara filosofi bisa juga diartikan bahwa pembangunan proses perubahan terus menerus dalam upaya memenuhi kebutuhan kebutuhan manusia. Tujuan dari pembangunan merupakan upaya untuk menciptaan percepatan pertumbuhan, pemerataan serta keberlanjutan (Suharyanto & Sofianto, 2012) dan dalam rangka terwujudnya permbangunan manusia secara keseluruhan serta menentukan masa depan masing masing maka penting masyarakat untuk berpartisipasi pada setiap proses kegiatan terutama pada saat penentuan kesepakatan keputusan yang dapat berpengaruh pada kehidupan (Noer, 2004). Anwar, (1999) dan Rustiadi. et al(2009) juga berpendapat bahwa proses perubahan baik itu secara *incremental* ataupun secara paradigma sebaiknya menuju kepada tujuan pembangunan wilayah untuk pemerataan (*equity*) yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi (*efficiency*) serta secara terus menerus (*sustainability*) dengan harapan tidak terjadi ketimpangan di antara wilayah satu dengan wilayah kelompok lainnya terutama dari sisi pendapatan.

Kegiatan pembangunan dengan pendekatan kawasan dilakukan dalam pengembangan kawasan pertanian untuk mendukung adanya swasembada pangan, dan secara regulasi pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian dengan Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 yang mengatur Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian yang kemudian diperbarui menjadi Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 mengenai Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.

Sebagai upaya memastikan bahwa semua orang, baik sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai kualitas

hidup yang lebih baik maka penting adanya pembangunan berkelanjutan (Taylor, 2003). Untuk tercapainya pembangunan, yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka perlu perencanaan yang baik. Perencanaan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan hambatan (Budianta, 2010). Perencanaan yang tepat penting karena akan mengarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai yang hasil akhirnya diharapkan akan menimbulkan dampak positif bagi daerah (Simamora & Supriadi, 2013). Hal lain yang menjadi perhatian adalah bagaimana membuat strategi agar tujuan yang direncanakan tercapai (Barambae, Elviseni Y, 2019)

Perencanaan pengembangan kawasan pertanian penting disusun secara tepat sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki, Perencanaan sendiri merupakan upaya dalam rangka menentukan, mengarahkan dan mengaitkan fakta-fakta yang ada dengan cara membangun asumsi-asumsi perkiraan masa yang akan datang kemudian merumuskan serta menggambarkan kegiatan apa saja yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan (Riyadi., & Bratakusumah, 2004). Perencanaan juga disusun sebagai bahan membuat kebijakan pembangunan (Simamora & Supriadi, 2013). Sementara itu Perencanaan wilayah dapat diartikan sebagai perencanaan untuk penggunaan ruang wilayah dan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan pada ruang wilayah tersebut (Tarigan, 2006).

Pada pembangunan wilayah sangat penting adanya suatu rencana yang tepat yang dapat memberi petunjuk kegiatan pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai agar mampu memberikan manfaat positif. Sementara itu kondisi yang terjadi berdasarkan Murtiningrum & Oktoyoki, (2019) pada proses perencanaan penting untuk mengikutsertakan secara aktif masyarakat yang merupakan bagian dari perencanaan. Pelibatan secara aktif masyarakat pada proses perencanaan dapat

terjadi apabila kondisi masyarakat berdaya. Kondisi yang ada saat ini pada program program kegiatan pengembangan wilayah pada sektor agribisnis yang telah dilakukan pemerintah memperlihatkan hasil belum sepenuhnya membuat petani lebih berdaya. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pelibatan masyarakat pada perencanaan kegiatan sampai dengan proses realisasi program pengembangan (Syafa'at. et al, 2016). Persoalan kegiatan pembangunan yang belum mengikutsertakan atau mengajak masyarakat sebagai sumber daya lokal desa dan sumber daya manusia merupakan salah satu persoalan pada proses perencanaan yang menjadikan perecanaan pembangunan yang belum terakomodir semua usulan masyarakat (Ahmad Sururi & Rahmi Mulyasih, 2017).

Pendekatan Pemberdayaan telah di gaung gaungkan didalam pelaksanaan pembangunan masyarakat mensyaratkan bahwa masyarakat komunitas lokal, terutama masyarakat marginal yang selama bertahun tahun berposisi sebagai objek pembangunan yang keterlibatannya sebatas pelaksanaan pembangunan dari sebuah program yang telah diputuskan dan ditetapkan pemerintah mengalami perubahan menjadi subjek yang juga ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan ((Soetomo, 2018).

Keberdayaan dalam konteks masyarakat menurut Wrihatnolo R.R dan Dwijoyowiyoto R.N, (2007) merupakan kemampuan seseorang yang bersatu dalam masyarakat sebagai upaya dalam membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Keberdayaan pada masyarakat menjadi unsur di masyarakat untuk membuat masyarakat mampu bertahan (*survive*) sebagai upaya mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Ketika kita lihat dari sisi proses operasionalisasinya menurut Hadi, (2015), maka ide pemberdayaan mempunyai kecenderungan dua macam. Kedua macam kecenderungan ini berupa kecenderungan primer sebagai kecenderungan pertama yaitu kecenderungan proses yang

memberikan atau membagi sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*Power*) kepada masyarakat atau individu dengan tujuan agar masyarakat menjadi lebih berdaya. Untuk mewujudkan ini maka upaya yang dilakukan bisa melalui upaya membangun asset material agar dapat mensupport pembangunan kemandirian melalui lembaga organisasi. Kecenderungan kedua adalah kecenderung sekunder berupa upaya yang dilakukan dengan cara memberikan stimulus atau memotivasi dan memberi semangat/mendorong agar individu individu tersebut mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentikan sikap dan pilihan hidup masing masing.

Bentuk perwujudkan dari konsep pemberdayaan secara umum berlaku dan fokus pada tingkatan komunitas atau kelompok kelompok kecil masyarakat yang merupakan basis dari kehidupan masyarakat. Pada tingkat komunitas inilah persoalan dan kebutuhan yang paling akurat diketahui. Untuk itu penyusunan program pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat. Pada proses pembangunan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan dalam praktiknya tidak jarang pemaksaan konsep pemberdayaan menjadi menyimpang “salah kaprah” dari yang sesungguhnya. Suntikan dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat seringkali disebut sebagai sebuah pemberdayaan terlepas dari pendekatan yang digunakan termasuk juga bantuan yang tidak mendidik yang berorientasi pada pengembangan kapasitas sehingga yang ada malah menimbulkan ketergantungan.

Pemberdayaan pada proses ini dimaksudkan sebagai sebuah bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif dalam tahap proses perencanaan. Keterlibatan ini diwujudkan dalam bentuk ada dan mempunyai peran serta paham dengan tujuan dan proses yang dilakukan dalam perencanaan. Dengan dasar ini kemudian penting untuk diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberdayaan

masyarakat pada perencanaan pengembangan kawasan kopi

Metode Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di wilayah Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dan Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong yang ada di Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi dilakukan dengan cara sengaja (*Purposive*) dengan mempertimbangkan bahwa dari 9 Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu 2 Kabupaten ini adalah 2 Kabupaten penghasil kopi terbesar pertama dan kedua.

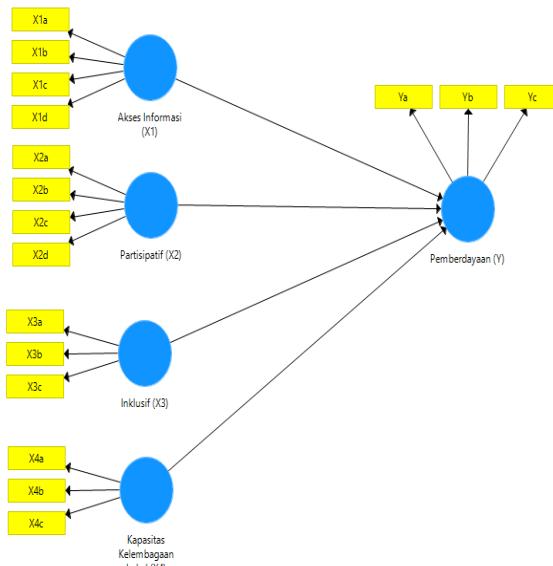
Pada Penelitian ini metode yang digunakan *mixed methods research* dengan model *concurrent embedded strategy* yaitu metode campuran berupa penguatan/ metode kedua memperkuat metode pertama (Creswell, 2009). Responden Penelitian adalah petani kopi di Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Sindang Dataran dan data juga di ambil dari informan penelitian yang diambil dengan cara *purposive* dan *snowball*, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian dan untuk jumlahnya semakin lama makin banyak terarah sesuai dengan makin fokus penelitian (Satori Djaman & Komariah aan, 2020). Untuk sampel petani metode simple random sampling yang digunakan dan sebagai alat menentukan responden di gunakan tabel acak.(Sugiyono, 2017) dengan derajat kesalahan 5%. Data penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan studi dokumentasi, wawancara, observasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Analisa kualitatif dan analisa kuantitatif dilakukan sebagai berikut; Untuk analisa kualitatif dilakukan secara interaktif dimana data dan informasi yang didapat dideskripsikan berdasarkan fenomena yang ditemui dilapangan.Untuk analisa kuantitatif menggunakan metode pembobotan *scala Likert* dan *Structural Quation Modelling* (SEM) PLS.

Tabel 1.Kriteria Evaluasi Model SEM-PLS

No	Kriteria	Nilai Ambang
A	Model Pengukuran Reflektif	
1.	Reliabilitas konsistensi internal : CR lebih besar 0,70 namun untuk meneliti eksplorasi 0,60 – 0,70 masih dapat diterima	$\geq 0,6$
2.	Reliabilitas indikator : loading indikator lebih besar dari 0,70 namun untuk penelitian eksplorasi 0,40 masih bisa diterima	$\geq 0,4$
3.	Validitas konvergen : <i>Average Variance Extracted</i> (AVE) lebih besar dari 0,50	$\geq 0,5$
4.	Validitas diskriminan : AVE setiap konstrak lebih besar dari korelasi kuadrat tertinggi konstrak lainnya (<i>Fornell-Larcker Criterion</i>). Loading indikator lebih besar dari cross loadingnya	Sesuai kriteria.
B.	Model Struktural	
1.	R ² untuk konstruk variabel endogen dengan model struktural 0,75 (substansial), 0,50 (moderat) atau 0,25 (lemah)	Sesuai hasil
2.	Koefisien jalur signifikan. Nilai kritis t-statistik untuk uji dua sisi adalah 1,65 (tingkat signifikansi = 10 persen), 1,96 (taraf signifikansi = 5%) dan 2,58 (tingkat signifikansi = 1 persen)	Sesuai hasil
3.	Relevansi prediktif : cross validate redundancy dengan nilai omission distance (d) antara 5-10, nilai Q ² lebih besar dari 0	Sesuai hasil

Tahapan evaluasi model PLS harus di evaluasi pada setiap tahapan dan prosesnya melalui cara evaluasi outer model dan evaluasi inner model.

**Gambar 1.** Model Tahap Awal

Adapun Variabel laten dan Variabel Manifest Indikator Pemberdayaan pada perencanaan kawasan seperti ditunjukkan di Tabel 2.

Tabel 2. Variabel laten dan Variabel Manifest Indikator pemberdayaan pada perencanaan kawasan.

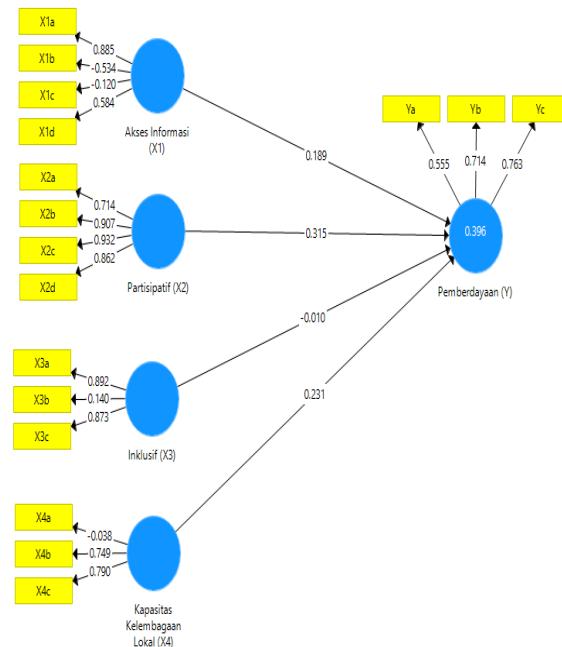
No	Variabel laten	Variabel Manifest Indikator	Simbol
1.	Akses Informasi	Jenis Informasi Media informasi Kemudahan mendapatkan informasi Kredibilitas Informasi	X1a X1b X1c X1d
2.	Partisipatif	Planning : X2a Perencanaan Organizing : X2b Pengorganisasian Actuating X2c :Pelaksanaan Controling : X2d Monitoring dan evaluasi	
3.	Inklusif	Terbuka terhadap keberagaman Toleransi Kemudahan berinteraksi	X3a X3b X3c
4.	Kapasitas Kelembagaan Lokal	Ketersediaan lembaga lokal sebagai wadah untuk membuat perencanaan	X4a

5. Pemberdayaan	Ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan Pengetahuan Sikap Keterampilan	X4b X4c X4d X4e
	Ada Kemauan Merasa mendapatkan manfaat Ingin mendapatkan informasi	Ya Yb Yc
	Ada kemampuan	Yd

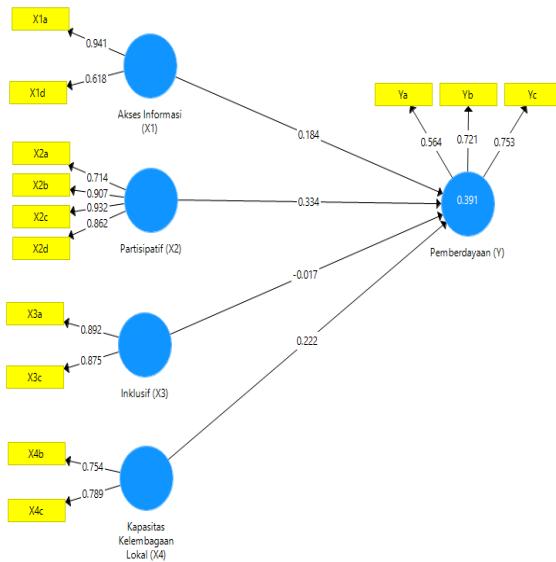
Hasil dan Pembahasan

1. Pengujian instrument penelitian (Outer Model).

Uji Validitas digunakan dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana pertanyaan-pertanyaan pada kuisioner yang disusun dapat mewakili variabel yang diukur. Pengujian ini menggunakan Loading faktor dari perhitungan PLS. Indikator yang mempunyai nilai loading faktor yang besar menunjukkan bahwa indikator tersebut mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel laten sehingga mendukung tingginya realibilitas. Berdasarkan running data 1 di dapatkan hasil sebagai berikut:

**Gambar 2.** Model Tahap 1 (PLS_Algoirthm).

Dari hasil Running data dilakukan drop pada indikator indikator yang mempunyai nilai if< 0,5 (X1b, X1c, X3b, dan X4a) sehingga di dapatkan output model berikut ini:



Gambar 3. Model Tahap 2 PLS

2. Uji Nilai Inner Model dan Struktural Model

Proses uji inner model atau model struktural dilakukan dengan cara melihat hubungan antara variabel, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model *structural* kemudian dievaluasi dengan cara menggunakan *R-square* untuk variabel dependen.

Tabel 3. R Square

Variabel	R Square
Pemberdayaan(Y)	0,391

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data Diolah)

Tabel 3. diatas memperlihatkan nilai *R-square* variabel Pemberdayaan Masyarakat sebesar 0,391 artinya variabilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dijelaskan oleh variable Akses Informasi, Partisipatif, Inklusif, dan Kapasitas Kelembagaan Lokal sebesar 39,1 %. Nilai *R-square* yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan variable independen dalam menjelaskan variable

dependen dan menunjukkan semakin baiknya persamaan structural yang ada. Hal ini sejalan dengan (Maryani, et al, 2019) faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan adalah, dukungan biroraksi pemerintah lokal terhadap pembangunan sosial, tingkat pendidikan masyarakat, akses akses masyarakat terhadap informasi program dan partisipasi masyarakat.

Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan uji hipotesis berpedoman dengan nilai yang ada pada *analisis structural model*, tingkat signifikansi *path coefficient* didapat dari nilai-t dan nilai *standardized path coefficient*. Sebagai batas nilai pengujian hipotesis ditentukan dengan Nilai-t muatan faktornya (*factor loadings*) yang lebih besar dari nilai kritis (≥ 1.96).

Tabel 4. Tabel Path Coefficient

Path Coefficients	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Akses Informasi (X1) -> Pemberdayaan (Y)	0,184	0,184	0,054	3,413	0,001
Partisipatif (X2) -> Pemberdayaan (Y)	0,334	0,334	0,069	4,810	0,000
Inklusif (X3) -> Pemberdayaan (Y)	-0,017	-0,013	0,066	0,262	0,794
Kapasitas Kelembagaan Lokal (X4) -> Pemberdayaan (Y)	0,222	0,222	0,066	3,352	0,000

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4 *Path Coefficient* dari hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa Akses informasi berperan positif signifikan dengan nilai t-hitung $3,413 > 1,96$ dengan nilai p-value sebesar $0,001 < 0,05$. Besarnya pengaruh faktor akses informasi adalah 18,4% yang menunjukkan bahwa akses informasi berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat, dimana ketika masyarakat menerima atau mendapatkan informasi dapat membuat masyarakat kemudian mendapatkan pengetahuan untuk melakukan proses perencanaan pengembangan kawasan sehingga terdapat rasa memiliki dan perencanaan yang disusun

merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dengan demikian pada proses pelaksanaannya dilakukan dengan sepenuh hari dengan kesadaran yang menyusun program ini adalah mereka sendiri. Untuk faktor partisipasi berpengaruh positif signifikan dengan nilai t-hitung $4,810 > 1,96$ dengan nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$. Besarnya pengaruh faktor partisipatif pada pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 33,4 % yang menunjukkan bahwa faktor partisipatif berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka pemberdayaan yang ada pada masyarakat juga semakin baik. Dari hasil analisa data ditemukan untuk faktor inklusif tidak berperan positif dengan nilai t-hitung 0,262 $< 1,96$ atau dengan nilai p-value sebesar $0,794 > 0,05$. Besarnya pengaruh adalah -0,013 (-1,3%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal kesempatan yang diberikan kepada seluruh masyarakat untuk terlibat aktif pada proses perencanaan pengembangan kawasan pertanian kopi. Keberdayaan masyarakat lebih karena faktor informasi yang di terima, partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan lokal yang dimiliki yang menjadi wadah masyarakat berkumpul dan meningkatkan kapasitas diri untuk melakukan kegiatan kegiatan dalam upaya pemberdayaan. Sementara itu untuk faktor kapasitas kelembagaan lokal menujukkan hasil berperan positif dengan nilai t-hitung $3,352 > 0,05$. Besarnya pengaruh kapasitas kelembagaan lokal terhadap pemberdayaan adalah 22,2%. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kapasitas kelembagaan lokal yang ada pada masyarakat maka pemberdayaan yang ada pada masyarakat semakin baik dalam rangka mendukung proses perencanaan pengembangan kawasan yang juga semakin baik untuk keberhasilan pengembangan kawasan kopi ini sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data di simpulkan bahwa faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat pada proses perencanaan pengembangan kawasan kopi adalah Faktor akses informasi, partisipatif dan kelembagaan lokal. Sementara untuk faktor inklusif tidak berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Rekan Rekan yang telah mensupport terselesaikannya tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sururi, & Rahmi Mulyasih. (2017). Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanásalam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 218–238. <https://doi.org/10.29062/engagement.v1i2.17>
- Anwar, A. R. E. (1999). *Desentralisasi Spatial melalui pembangunan agropolitan dengan mereplikasi kota-kota menengah-kecil di wilayah pedesaan*. (1977).
- Barambae, Yuliet Elviseni. (2019). Perencanaan kawasan pariwisata di Kecamatan Tomohon Selatan. *Jurnal Spasial*, 6(2), 321–330.
- Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. *Jurnal SMARTek*, 8(1), 72–82. Diambil dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTEK/article/view/628/546>
- Creswell. (2009). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*, (1987), 1–14.
- Maryani, Dede; Nainggolan, R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat* (Pertama). Sleman: Penerbit Deepublish.
- Murtiningrum, F., & Oktoyoki, H. (2019). Perencanaan Pengembangan Kawasan berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Review and Perspectives. *JAS (Jurnal Agri Sains)*, 3(2). <https://doi.org/10.36355/jas.v3i2.290>
- Noer, M. (2004). Pembangunan berbasis kelembagaan adat: sebuah alternatif pembelajaran dari kasus kinerja kelembagaan. *Mimbar*, XXII No.(2 April-Juni 2006), 235–258.
- Riyadi., & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rustiadi. E, Saefulhakim.S, D. R. (2009). *Perencanaan dan pengembangan wilayah* (ke 4 Mei 2; A. E. Pravitasari, ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Satori Djaman & Komariah aan. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (8 ed.). Bandung.
- Simamora, A. P., & Supriadi, S. (2013). Analisis potensi sektor pertanian terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Humbang Hasudutan. *Ekonom*, 16(2), 54–66.
- Soetomo. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat “Mungkinkah muncul antitesisnya?”* (IV). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suharyanto, S., & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*, 04(04), 251–260. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.251-260>
- Syafa'at. et al. (2016). Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Agribisnis Dalam Rangka Pemberdayaan Petani. *Forum penelitian Agro Ekonomi*, 21(1), 26. <https://doi.org/10.21082/fae.v21n1.2003.26-43>
- Tarigan, R. (2006). *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (Edisi Revi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Taylor, N. (2003). More or less meaningful concepts in planning theory (and how to make them more meaningful): A plea for conceptual analysis and precision: *Planning Theory*, 2(2), 91–100. <https://doi.org/10.1177/14730952030022001>
- Wrihatnolo R.R dan Dwijoyowiyoto R.N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Komputindo.